

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENELITIAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga meliputi aspek sosial, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur (Benjamin & Béchervaise, 2022; Najitama et al., 2020; Viarum & Susilowati, 2024). Menurut *World Bank* dalam penelitian Fitri (2024) salah satu penyebab utama kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan.

Di Indonesia, definisi kemiskinan secara resmi mengacu pada konsep yang dikemukakan oleh BPS di mana dalam publikasinya BPS (2023, p. 3) memandang kemiskinan sebagai kondisi di mana seseorang tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun nonpangan, yang diukur berdasarkan garis kemiskinan. Seseorang diklasifikasikan sebagai miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran perbulan perkapita yang berada di bawah ambang batas garis kemiskinan yang ditetapkan.

Dalam penelitian Benjamin dan Béchervaise (2022) yang diadopsi dari laporan bagian 1 ACOSS tentang Kemiskinan di Australia (2020) menyatakan seseorang dikategorikan miskin ketika pendapatan bersih rumah tangga mereka berada di bawah tingkat yang dianggap memadai untuk mencapai hidup yang dapat

diterima. Pengukuran ini tidak dilakukan secara langsung dengan menanyakan apakah seseorang kekurangan kebutuhan dasar, melainkan dengan menetapkan tolak ukur kecukupan pendapatan rumah tangga pada 50% dari pendapatan bersih rumah tangga median yang disebut dengan garis kemiskinan.

Sedangkan di Indonesia garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis kemiskinan ditetapkan sebagai representasi dari nilai rupiah yang dibutuhkan seseorang untuk dapat hidup layak, yang mencakup kebutuhan makanan setara dengan 2.100 kilo kalori perhari dan kebutuhan nonmakanan seperti sandang, pendidikan, dan kesehatan (BPS, 2024).

Secara konseptual, kemiskinan dapat dipandang melalui dua perspektif, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dalam perspektif absolut, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan mencapai standar minimum tertentu yang telah ditetapkan. Pengukuran kemiskinan absolut didasarkan pada *International Poverty Line* (IPL) yang ditetapkan Bank Dunia (Zheng & Li, 2024). Misalnya Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan internasional sebesar \$2,15 per hari berdasarkan harga tahun 2017 (World Bank Group, 2024). Sedangkan dalam Publikasi BPS (2023, p. 57) Kemiskinan absolut mengacu pada ketidakmampuan seseorang dalam mencapai standar hidup minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, baik kebutuhan makanan maupun nonmakanan. Standar minimum ini diukur menggunakan garis kemiskinan Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu, namun

memiliki keterbatasan karena tidak mempertimbangkan konteks sosial ekonomi spesifik suatu wilayah.

Sementara itu, dalam penelitiannya Zheng dan Li (2024) menyatakan bahwa kemiskinan relatif merujuk pada kondisi kehidupan sosial seseorang yang berada di bawah rata-rata standar hidup masyarakat secara umum, yang tercermin dari adanya perbedaan tingkat pendapatan. Dengan kata lain kemiskinan relatif memandang kemiskinan dalam konteks ketimpangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Misalnya di Uni Eropa seseorang mungkin dianggap miskin jika pendapatannya di bawah 60% dari pendapatan rata-rata yang dibelanjakan. Sedangkan dalam publikasinya, BPS menyatakan bahwa kemiskinan relatif terjadi akibat dampak dari kebijakan kemampuan yang tidak merata, di mana tidak semua lapisan masyarakat dapat terjangkau oleh kebijakan tersebut, sehingga menciptakan kesenjangan dalam distribusi pendapatan antar kelompok masyarakat (BPS, 2023, p. 57).

2.1.2. Dimensi Sosial-Ekonomi

2.1.2.1. Konsep Dasar Kemiskinan dalam Dimensi Sosial-Ekonomi

Kemiskinan sebagai kondisi multidimensional yang tidak hanya mencakup ketidakmampuan ekonomi tetapi juga keterbatasan terhadap berbagai akses kehidupan seperti sosial budaya, politik, maupun partisipasi masyarakat (Sudarmadi, 2020). Sejalan dengan hal tersebut Bartolomei et al. (2024) memperluas pemahaman ini dengan mengintegrasikan aspek pendapatan, pendidikan, dan kesehatan sebagai indikator utama kemiskinan.

Dalam penelitiannya, Hasanah et al. (2021) menyebutkan bahwa kemiskinan memiliki banyak dimensi. Dalam dimensi sosial kemiskinan berkaitan

dengan stratifikasi sosial atau pembedaan lapisan masyarakat antara mereka yang kaya dan mereka yang miskin. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan dan ketidaksetaraan sosial. Sementara dalam dimensi ekonomi kemiskinan berhubungan dengan pendapatan individu dan kondisi perekonomian secara keseluruhan dalam suatu negara. Dimensi ini menyangkut aspek-aspek material seperti tingkat pendapatan.

Sementara Arniati (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sosial ekonomi merujuk pada posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat yang ditentukan oleh aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pendapatan mereka. Penentuan strata sosial ekonomi dalam masyarakat diukur melalui beberapa indikator seperti jenis pekerjaan, besaran pendapatan, kepemilikan aset, jabatan, dan aktivitas ekonomi lainnya. Dalam hal ini, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi kekurangan sumber daya, baik yang bersifat dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang berkaitan dengan kualitas hidup.

2.1.2.2. Pengukuran Kemiskinan dalam Dimensi Sosial-Ekonomi

Pengukuran dimensi sosial-ekonomi kemiskinan dapat dilakukan melalui beberapa indikator utama yang saling terkait dan melengkapi, yaitu:

1. Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin menunjukkan banyaknya orang yang pengeluarannya berada di bawah garis kemiskinan. Dalam perhitungannya, persentase penduduk miskin dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dengan total jumlah penduduk (Nugraha, 2020). Sejalan dengan publikasinya BPS Jawa

Tengah (2024) menyebutkan bahwa *Head Count Index* (HCI- P_0) menunjukkan seberapa persen penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Utama (2023) dalam penelitiannya menyebutkan Indeks kedalaman kemiskinan (P_1) merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh jarak antara pengeluaran rata-rata penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Indeks ini dapat digunakan sebagai perbandingan antar wilayah di mana semakin tinggi nilai P_1 suatu daerah maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk daerah tersebut dari garis kemiskinan, sehingga dengan ukuran ini dapat diketahui jika penduduk miskin menjadi lebih miskin. Sementara itu, dalam publikasi BPS Jawa Tengah (2024) Indeks Kedalaman Kemiskinan mengukur seberapa jauh jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan. Nilai indeks yang lebih tinggi menandakan bahwa pengeluaran rata-rata masyarakat semakin jauh dari standar garis kemiskinan.

Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran tentang bagaimana penyebaran pengeluaran di antara masyarakat miskin (Situmorang & Susanti, 2020). Semakin tinggi nilai indeks keparahan, menunjukkan ketimpangan pengeluaran yang semakin besar di kalangan penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan digunakan untuk mengamati variasi atau perbedaan total pengeluaran di antara penduduk miskin di suatu wilayah (B. E. Saputra, 2024). Sementara itu, dalam publikasi BPS Jawa Tengah (2024) Indeks keparahan kemiskinan menggambarkan bagaimana distribusi pengeluaran di kalangan masyarakat miskin. Semakin tinggi nilai indeksnya, mengindikasikan kesenjangan pengeluaran yang semakin besar antar penduduk miskin.

Dalam perhitungannya, BPS menggunakan rumus:

$$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{Z - y_i}{Z} \right]^a$$

Keterangan:

$a = 0, 1, 2$

$Z =$ Garis kemiskinan

$Y_i =$ Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$) $y_i < z$

$q =$ Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$n =$ Jumlah penduduk

Jika $a=0$ maka diperoleh *Head Count Index* atau Persentase Penduduk Miskin (P_0); Jika $a=1$ maka diperoleh Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1); Jika $a=2$ maka diperoleh Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2).

2. Pengeluaran Perkapita Sebulan untuk Makanan

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status kemiskinannya, yang ditentukan berdasarkan rata-rata pengeluaran per orang per bulan dalam rumah tangga tersebut. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu pengeluaran untuk membiayai kebutuhan makanan, serta pengeluaran untuk membiayai kebutuhan bukan makanan seperti perumahan, pakaian, dan pendidikan. Pada umumnya, sebagian besar dari pengeluaran per orang per bulan pada rumah tangga miskin dialokasikan untuk membiayai kebutuhan makanan (BPS Jawa Tengah, 2024, p. 24).

Dalam publikasinya, BPS menyebutkan pengeluaran per kapita adalah total pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Sedangkan persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan, dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan dan nonmakanan) (BPS Jawa Tengah, 2024, p. 11).

Dengan demikian pengeluaran per kapita menggambarkan rata-rata pengeluaran per orang dalam suatu rumah tangga. Sedangkan persentase pengeluaran per kapita untuk makanan menunjukkan seberapa besar porsi pengeluaran untuk konsumsi makanan dibandingkan total pengeluaran per orang.

3. Penghasilan Pekerja Formal dan Informal

Bekerja didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh penduduk miskin berusia 15 tahun atau lebih, dengan tujuan mendapatkan atau membantu mendapatkan penghasilan atau keuntungan. Aktivitas ini minimal dilakukan selama satu jam selama berturut-turut dalam kurun waktu seminggu terakhir (BPS Jawa Tengah, 2024, p. 11).

Ditinjau dari status pekerjaan utama, bekerja di sektor formal mengacu pada penduduk yang dalam pekerjaan utamanya memiliki status atau kedudukan sebagai pekerja yang dibantu oleh buruh tetap/buruh yang dibayar atau bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai (BPS Jawa Tengah, 2024, p. 11). Dengan kata lain pekerja sektor formal memiliki status yang jelas baik sebagai pemberi kerja yang memperkerjakan buruh maupun sebagai buruh/karyawan/pegawai yang dibayar.

Sedangkan bekerja di sektor informal mengacu pada penduduk miskin yang dalam pekerjaan utamanya memiliki status atau kedudukan sebagai wirausaha yang

bekerja sendiri, wirausaha yang dibantu buruh tidak tetap atau tidak dibayar, pekerja bebas/lepas, atau pekerja keluarga tanpa upah (BPS Jawa Tengah, 2024, p. 11). Hal ini berbeda dengan sektor formal di mana pekerja memiliki status kepegawaian yang jelas sebagai karyawan/pegawai tetap atau pemberi kerja dengan buruh tetap, serta mendapatkan upah/gaji tetap beserta jaminan kerja dan tunjangan. Sementara di sektor informal, status pekerjaan cenderung tidak tetap atau tidak terikat, dengan penghasilan yang tidak menentu dan umumnya tanpa jaminan kerja serta tunjangan formal seperti yang ada di sektor formal.

Kebanyakan orang yang bekerja di sektor informal bukan karena pilihan mereka sendiri, melainkan karena terbatasnya kesempatan kerja, termasuk peluang wirausaha. Pekerjaan informal biasanya tidak menyediakan perlindungan sosial berbasis tenaga kerja (UNDP OPHI, 2020, p. 33).

Dalam publikasi yang disusun Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2024, p. 25) Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal adalah perkiraan jumlah orang yang bekerja di kegiatan informal dibandingkan dengan total jumlah orang yang bekerja. Penduduk yang bekerja di sektor formal atau informal mencakup mereka yang berstatus sebagai berusaha dengan dibantu buruh tetap dan dibayar, serta buruh/karyawan/pegawai. Sementara sisanya termasuk ke dalam kategori penduduk yang bekerja di sektor informal.

Klasifikasi lapangan pekerjaan disajikan dalam 17 kategori yang mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020. Klasifikasi tersebut yaitu:

1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan;

2. Pertambangan dan Penggalian;
3. Industri Pengolahan;
4. Pengadaan Listrik dan Gas;
5. *Treatment* Air, *Treatment* Air Limbah, *Treatment* dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi;
6. Konstruksi;
7. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
8. Pengangkutan dan Pergudangan;
9. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;
10. Informasi dan Komunikasi;
11. Aktivitas Keuangan dan Asuransi;
12. Real Estat;
13. Aktivitas Profesional dan Perusahaan;
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib;
15. Pendidikan;
16. Aktivitas Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
17. Aktivitas Jasa Lainnya.

2.1.3. Dimensi Pendidikan

2.1.3.1. Konsep Dasar Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan

Faktor lainnya yang dapat menyebabkan kemiskinan adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Pendidikan merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua orang, karena masyarakat yang terdidik setidaknya memiliki kemampuan untuk

membebaskan diri dari kemiskinan. Tingkat pendidikan dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Pendidikan dianggap sebagai faktor terpenting yang dapat membantu seseorang keluar dari kemiskinan, karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan (Hasanah et al., 2021).

Pendidikan memainkan peran kunci dalam menentukan kualitas modal manusia untuk meningkatkan produktivitas setiap individu (Yuliyanto, 2024). Dalam konteks kemiskinan Maharani et al. (2024) menekankan bahwa kemiskinan dan rendahnya kualitas pendidikan merupakan dua masalah yang saling terkait dan menjadi tantangan besar dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan mencegah akses masyarakat terhadap pendidikan yang baik, sementara rendahnya kualitas pendidikan juga turut memperpanjang siklus kemiskinan,

2.1.3.2. Pengukuran Kemiskinan Dalam Dimensi Pendidikan

Keunggulan pendidikan suatu daerah dapat diukur dari besarnya indeks pendidikan melalui angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) (Rahminawati, 2023). RLS mengukur rata-rata jumlah tahun penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal. Sementara itu, HLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun sekolah formal yang diharapkan akan ditempuh oleh penduduk sejak usia tertentu. Semakin tinggi nilai RLS dan HLS di suatu daerah, menunjukkan semakin berkualitasnya sistem pendidikan dan sumber daya manusia di wilayah tersebut (Sidabutar et al., 2020).

RLS adalah indikator penting yang menunjukkan tingkat pendidikan di suatu daerah (Putra Kusuma & Bendesa, 2022). RLS dan HLS mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh penduduk di suatu daerah, berarti semakin tinggi pula kualitas seseorang dalam pola pikir maupun pola tindakannya. (Rahminawati, 2023).

2.1.4. Dimensi Kesehatan

2.1.4.1. Konsep Dasar Kemiskinan Dalam Dimensi Kesehatan

Kemiskinan dan kesehatan yang tidak memadai merupakan dua tantangan yang saling terkait dan terus menghambat pembangunan di Indonesia (Sarjito, 2024a). *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan kesehatan sebagai suatu kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap tidak hanya bebas dari penyakit atau kelemahan. Sementara itu, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan kesehatan adalah keadaan secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Dalam penelitian Sarjito (2024a) menyatakan bahwa Kemiskinan dan pelayanan kesehatan yang tidak memadai merupakan dua tantangan yang saling terkait dan terus menghambat pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia. Kemiskinan memiliki implikasi buruk terhadap akses pelayanan kesehatan di Indonesia. Hal ini didukung oleh Isroviyah (2022) dengan menyatakan kemiskinan yang tinggi di suatu wilayah sering terkait erat dengan kondisi perekonomian, sumber daya manusia, serta akses dan kualitas layanan kesehatan yang masih rendah di daerah tersebut.

Kesehatan yang buruk menyebabkan kemiskinan dengan mengganggu sumber daya dan memaksa mengorbankan kebutuhan dasar untuk membiayai pengobatan. Buruknya kesehatan dapat mengurangi kapasitas kerja baik sementara maupun permanen. Dengan demikian kesehatan yang buruk dapat mendorong pendapatan di bawah ambang batas kemiskinan (O'Donnell, 2024). Lebih lanjut Lincoln dalam Salsabil (2023) mengungkapkan intervensi pemerintah untuk memperbaiki kesehatan merupakan alat kebijakan yang penting untuk mengurangi kemiskinan. Salah satu dasar pemikirannya adalah bahwa perbaikan kesehatan akan meningkatkan produktivitas masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan kesehatan yang baik dapat meningkatkan daya kerja dan kapasitas produktif, mengurangi hari-hari tidak bekerja karena sakit, dan meningkatkan output atau hasil kerja.

2.1.4.2. Pengukuran Kemiskinan Dalam Dimensi Kesehatan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Isroviyah (2022) Todaro berpendapat bahwa modal manusia dapat diukur melalui aspek kesehatan, karena kesadaran akan kesehatan berkaitan dengan produktivitas seseorang dalam beraktivitas.

Febriana dalam Matdoan et al. (2024) tingkat kesehatan seseorang dapat tercermin dari produktivitasnya dalam menjalankan kegiatan sehari-hari, seperti bersekolah, kuliah, dan aktivitas sosial bagi lansia. Kesehatan merupakan kebutuhan fundamental bagi setiap manusia, karena tanpa kesehatan yang memadai, masyarakat tidak dapat mencapai produktivitas yang optimal. Hal ini didukung oleh Adhitya et al. (2022) di mana kesehatan merupakan salah satu faktor paling berpengaruh terhadap kemiskinan. Kesehatan dapat dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan dan memperbaiki produktivitas serta kualitas sumber

daya manusia, yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kemiskinan dan kondisi kesehatan saling terkait. Kemiskinan dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang buruk, yang pada gilirannya akan memperburuk kemiskinan itu sendiri.

Dalam pengukurannya, aspek kesehatan dapat dinilai menggunakan indikator Angka/Usia Harapan Hidup (UHH). Semakin tinggi UHH seseorang menunjukkan semakin berkualitas parameter kesehatannya. UHH merupakan perkiraan rata-rata lama hidup tambahan yang diharapkan dapat dinikmati seseorang. UHH dapat didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang diperkirakan akan dijalani oleh seseorang setelah mencapai usia tertentu. Ukuran UHH yang paling umum digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir, yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat pada saat ini. Semakin tinggi UHH saat lahir, semakin baik kondisi kesehatan secara umum (Ginting, 2020).

2.1.5. Dimensi Infrastruktur/Standar Hidup Layak

2.1.5.1. Konsep Dasar Kemiskinan Dalam Dimensi Infrastruktur/Standar Hidup Layak

Standar hidup layak merupakan kondisi di mana individu memenuhi kebutuhan dasar dari dirinya sendiri (Sinurat, 2023). Di sisi lain, kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pendapatan dan kekayaan, tetapi juga oleh faktor nonpendapatan, seperti terbatasnya akses terhadap layanan dan fasilitas publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia seringkali dihubungkan dengan kurang memadainya infrastruktur di beberapa wilayah.

Padahal, ketersediaan infrastruktur yang memadai memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat.(Andrianus & Alfatih, 2023).

Kemudahan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan raya, Listrik, air minum, dan fasilitas layanan publik lainnya memiliki dampak signifikan pada kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu. Begitupula dengan akses ke sanitasi yang layak, yang berpengaruh pada kondisi kesehatan masyarakat dan pada akhirnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan (Andrianus & Alfatih, 2023).

2.1.5.2.Pengukuran Kemiskinan Dalam Dimensi Infrastruktur/Standar Hidup Layak

Dalam penelitiannya terkait analisis determian kemiskinan multidimensi di Indonesia Kause (2024) menggunakan beberapa indikator dalam dimensi standar hidup layak. Beberapa indikator tersebut yaitu, ketersediaan air minum, kelayakan sanitasi, akses terhadap listrik, dan kondisi lantai rumah,

Pembangunan infrastruktur di berbagai negara berfokus pada akses dasar dan konektivitas manusia, seperti sanitasi, air, dan listrik. Infrastruktur yang berkualitas secara efektif dan efisien akan mendorong kegiatan ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan (Andrianus & Alfatih, 2023). Hal ini di perkuat oleh Rahmizal (2022) dalam penelitiannya di mana akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan manusia, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan suatu negara.

Dalam penelitiannya Fahmi (2021) menyebutkan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang penting untuk memenuhi standar hidup yang sehat bagi manusia. Air bersih didefinisikan sebagai air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan memenuhi syarat kesehatan, serta aman untuk dikonsumsi setelah dimasak. Sayangnya, masyarakat miskin sering kali menghadapi kesulitan dalam memperoleh air bersih dan aman. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya terbatasnya penguasaan atas sumber air, belum terjangkaunya jaringan distribusi air ke wilayah mereka, menurunnya kualitas sumber air, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih dan sanitasi untuk kesehatan.

Selain itu kondisi sanitasi dan lingkungan yang buruk berdampak negative pada perkembangan kesehatan, khususnya pada anak-anak dan ibu-ibu di masyarakat miskin. Masyarakat miskin juga cenderung kurang memahami pentingnya pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari perilaku hidup sehat (Fahmi, 2021).

Selain ketersediaan akses terhadap sanitasi dan air minum yang layak dapat mendorong peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Di samping itu, akses terhadap listrik memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai aktivitas baik rumah tangga maupun aktivitas ekonomi (Sapthu, 2023). Hal ini menjadi semakin relevan di era globalisasi dan modernisasi saat ini, di mana ketersediaan listrik menjadi faktor pendorong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kause & Fithriyah, 2024).

Di samping itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Jamaruddin (2022) kualitas tempat tinggal yang nyaman sangat berkaitan dengan ukuran luas lantai

dan jenis material yang digunakan dalam pembangunannya. Sebuah rumah dapat dikatakan berkualitas jika memiliki dinding yang luas dan terbuat dari material yang baik seperti tembok atau kayu, dilengkapi dengan atap dari bahan beton, genteng, atau seng serta memiliki lantai yang tidak terbuat dari tanah. Hal ini diperkuat dalam publikasi *Multidimensional Poverty Peer Network* (MPPN) (2020, p. 15), di mana salah satu indikator dalam dimensi standar hidup layak dalam pengukuran kemiskinan multidimensi adalah jenis lantai.

Menurut BPS, jenis bahan bangunan lantai terluas yang layak terdiri atas marmer/granit, keramik, parket/vinil/karpet, ubin/tegel/teraso, kayu/papan, dan semen/bata merah. Dalam penelitiannya, Sukardi (2021) menyatakan bahwa suatu rumah tangga terdeprivasi atau kekurangan dalam hal tempat tinggal terjadi ketika kondisi keseluruhan atap, lantai, dan dinding berada dalam keadaan tidak layak. Khusus untuk lantai, kondisi tidak layak ditandai dengan penggunaan bahan selain marmer, keramik, granit, tegel, teraso, semen, dan kayu berkualitas baik. Lantai yang terbuat dari bambu, kayu/papan berkualitas rendah, tanah, atau bahan lainnya yang tidak standar dikategorikan sebagai tidak layak.

2.1.6. Penelitian Terdahulu

Setiap penelitian memiliki dasar dan landasan yang akan dijadikan referensi dan acuan, baik itu berupa teori maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inovasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian (Salmaa, 2022).

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang hendak dilakukan. Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relasi dengan penelitian ini dijabarkan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Khalif (2024). Klasterisasi Tingkat Kemiskinan di Indonesia Menggunakan Algoritma K- Means	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup Metode: Klasterisasi K- Means	Variabel: Persentase Pengeluaran Perkapita Untuk Makanan, Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Informal Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Harapan Lama Sekolah, Persentase RT Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih, Persentase RT Yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak, Persentase RT Dengan Sumber Penerangan Listrik PLN, Persentase Rumah Tangga Dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah Metode: PCA	Sekitar 95% dari populasi yang kurang mampu di Indonesia terkategori dalam kluster miskin. Keberhasilan pengelompokan ini dibuktikan dengan nilai Silhouette Score yang mencapai 0,7416 di mana menunjukkan bahwa metode klasifikasi yang digunakan berhasil dengan baik dalam membedakan antar kelompok.	Generati on Journal /Vol.8 No.1/e- ISSN: 2549- 2233/p- ISSN: 2580- 4952

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
2	Purwanti (2023). <i>Clustering Analysis of Multidimension al Poverty in Central Java Province, Indonesia</i>	Variabel: Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan; persentase rumah tangga terhadap akses sumber air minum, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA, Klasterisasi K- Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	Analisis klasterisasi menghasilkan model optimal dengan empat kelompok. Model ini mengidentifik asi beberapa faktor utama yang memiliki hubungan kuat dengan kondisi kemiskinan, yaitu besarnya pengeluaran di luar kebutuhan pangan, ketersediaan air bersih, kemudahan mengakses fasilitas sanitasi, tingkat pengangguran terbuka, dan kepemilikan televisi merupakan indikator yang paling berkorelasi terhadap kemiskinan.	Jurnal Inovasi Daerah, Vol 2, No. 2, Desembe r 2023
3	Kurniasari (2024). <i>Implementation of Fuzzy C- Means and Fuzzy</i>	Variabel: Persentase penduduk miskin; indeks kedalaman kemiskinan;	Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja	Algoritma FPCM memiliki kinerja lebih unggul dibandingkan	BAREK ENG: J. Math. & App., vol. 18(3),

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Possibilistic C-Means Algorithms on Poverty Data in Indonesia</i>	indeks keparahan kemiskinan	Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA dan Klusterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	algoritma FCM dalam mengelompokkan kemiskinan di Indonesia, yang dibuktikan melalui indeks validitas PE. Selain itu, studi ini menemukan bahwa jumlah kelompok yang paling sesuai untuk data tersebut adalah 2 klaster.	pp. 1919-1930, September, 2024.
4	Aldawiyah (2024). Analisis Faktor Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Utara Berdasarkan Regresi Komponen Utama	Variabel: Rata-rata lama sekolah Metode: PCA	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahana Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan;	Analisis dilakukan menggunakan 8 variabel independent yang kemudian menghaislkan tiga komponen utama. Ketiga	Variance : Journal of Statistics and Its Applications Volume 6 Nomor

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama;	komponen utama ini mampu menjelaskan sebesar 84,5% dari total variasi data yang ada.	1 April 2024
			Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.		
			Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
5	Erda (2023). <i>Grouping of Poverty in Indonesia Using K-Means with Silhouette Coefficient</i>	Variabel: Persentase Penduduk Miskin Metode: Klasterisasi K-Means	Variabel: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja	Berdasarkan metode Silhouette Coefficient, data terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama merupakan	Parameter: Journal of Statistics Vol. 3 No. 1 2023, 1 - 6

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	Kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi yang terdiri dari sembilan provinsi. Sementara kelompok ke dua mencakup 25 provinsi yang tergolong sebagai Kawasan dengan tingkat kemiskinan rendah. Dengan banyak yang termasuk ke dalam kelompok kemiskinan rendah, mengindikasikan secara umum tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 termasuk dalam kategori rendah.	
6	Fuziyah (2023). Penerapan Analisis <i>Cluster Hybrid</i> untuk Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Berdasarkan	Variabel: Persentase penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, rata-rata lama sekolah, Usia	Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja	Penerapan metode hybrid clustering menghasilkan dua hasil yang berbeda. Kombinasi K-Means dengan single linkage menghasilkan empat kluster.	Bandung Conference Series: Statistics Vol. 3 No. 2 (2023), Hal: 566-574 ISSN:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Indikator Kemiskinan Tahun 2022	Harapan Hidup	Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Harapan Lama Sekolah; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	Sedangkan kombinasi K-Means dengan ward method menghasilkan tiga kluster. Kombinasi tersebut merupakan metode optimal dengan nilai rasio simpangan baku terkecil sebesar 88.38%.	2828-206X
7	Rusli (2022). Analisis Faktor-Faktor Kesenjangan Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Metode <i>Principal Component Analysis</i> (PCA) dan <i>Confirmatory Factor Analysis</i> (CFA)	Variabel: Persentase penduduk miskin; indeks kedalaman kemiskinan; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup Metode: PCA	Variabel: Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Persentase Rumah Tangga Terhadap	Analisis yang dilakukan menggunakan dua metode, yaitu PCA dan CFA menghasilkan dua faktor utama yang dinamakan KEMAS (kemampuan Masyarakat) dan PERMAS (Perkembangan Masyarakat). Kedua faktor ini berhasil	Jurnal Statistika Industri dan Komputasi Volume 07, No. 2, Juli 2022, pp. 41-53

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	menangkap 80,40% dari keragaman data total. Selanjutnya, melalui analisis CFA, ditemukan dua variabel tidak valid sehingga dikeluarkan dari pembentukan variabel PERMAS agar menghasilkan model yang lebih baik.	
			Metode: Klasterisasi K-Means		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
8	Alfiah (2021). Analisis <i>Clustering K-Medoids</i> Berdasarkan Indikator Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2020	Variabel: persentase penduduk miskin; Usia harapan hidup; persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Variabel: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih;	Diperoleh pengelompokan karakteristik masing-masing cluster yang dibentuk berdasarkan nilai indikator kemiskinan di Jawa Timur tahun 2020 sebanyak 2 cluster. Di mana 30 kabupaten/kota pada cluster 1 dan 8 kabupaten/kota pada cluster 2. Cluster 1 memiliki karakteristik Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai	Jurnal Ilmiah Sains Volume 22 Nomor 1, April 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	Sanitasi Layak, Angka Harapan Hidup, dan Persentase Angka Melek Huruf Umur 15-55 Th tinggi. Sedangkan cluster 2 memiliki karakteristik Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Raskin, Persentase Penduduk Miskin, dan Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan dengan Status Miskin tinggi.	
9	Ningtyas (2022). Pengelompokan Kabupaten/Kota di Pulau Kalimantan Dengan <i>Fuzzy C-Means</i> Berdasarkan Indikator Kemiskinan	Variabel: Persentase penduduk miskin; rata-rata lama sekolah; usia harapan hidup; persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Variabel: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah;	Terdapat dua kluster yang optimal, di mana kluster pertama terdiri dari 36 kabupaten/kota, sementara kluster kedua terdiri dari 20 kabupaten/kota.	Jurnal Ekspansional Volume 13, Nomor 2, Nopember 2022

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Harapan Lama Sekolah; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
10	Tahir (2021). Aplikasi Metode Analisis Komponen Utama dalam Mengidentifikasi Faktor Yang Memengaruhi Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan	Variabel: pengeluaran perkapita untuk makanan Metode: PCA	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap	Terdapat 8 komponen yang terbentuk dari 18 variabel yang di analisis, yaitu faktor standar/kualitas kehidupan, pendidikan, ekonomi, pengangguran, lapangan pekerjaan, pola pikir, putus sekolah, serta kepadatan penduduk.	JOMTA Journal of Mathematics: Theory and Applications Vol. 3, No. 2, 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
11	Pasaribu (2019). Analisis Faktor Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Kalimantan, Sulawesi, Bali Dan Nusa Tenggara	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan Metode: PCA	Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki	Hasil PCA menunjukkan jumlah aspek/kompon en utama yang sama yaitu 9 aspek/faktor. Perbedaan kelompok ini karena BPS melakukan pengelompokan variabel sebelum kegiatan pendataan penduduk, sedangkan PCA mengelompok kan variabel berdasarkan data yang telah dihasilkan atau setelah pendataan	Jurnal Dinamik a Pertanian Edisi XXXV Nomor 2 Agustus 2019 (107- 116)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	penduduk selesai dilakukan. Hasil PCA dapat dimanfaatkan untuk tujuan penelitian lebih lanjut seperti klasterisasi wilayah, pelaksanaan evaluasi dan perencanaan	
12	Halida (2020). Analisis Kasus Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah Dengan Pendekatan <i>Principal Component Analysis</i>	Metode: PCA	Metode: Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023 Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih;	Hasil dari kajian ini menyederhanakan faktor kemiskinan menjadi 2 (dua) faktor, yakni faktor pertama yang terdiri dari variabel pendidikan, status bekerja, dan sektor bekerja. Sedangkan, faktor kedua terdiri dari variabel pendapatan perkapita untuk makanan. Selain itu, didapatkan eigen value terbesar pada variabel pendidikan sebesar 465.67	Jurnal Al-Qardh Volume 5 No.2

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	yang menunjukkan bahwa variabel pendidikan mempunyai pengaruh terbesar dalam kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2019.	
			Metode: Klasterisasi K-Means		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
13	Nurohmah (2023). Optimalisasi Performa <i>K-Means Clustering</i> Dengan PCA Dalam Analisis Tingkat Kemiskinan di Jawa Barat	Variabel: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki	Hasil evaluasi dari 2 skenario model pada penelitian ini menyatakan bahwa membangun model dengan tahap reduksi dimensi variabel terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan tahap pengelompokkan data menggunakan algoritma K-Means (skenario 2) yang menghasilkan performa terbaik diantara model lainnya dengan nilai	JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 7 No. 3, Juni 2023

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	evaluasi 0.74 yang termasuk dalam kriteria kuat.	
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
14	Agustin (2020). <i>Analysis of Multidimensional Poverty Indicators in Indonesia with Association Rules</i>	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas	Variabel: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup. Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	Analisis mengungkapkan tedapat 15 pola atau hubungan antar item dari indikator kemiskinan multidimensi, dengan nilai support berkisar antara 60% hingga 80% dan nilai confidence mencapai 100%. Pola hubungan yang terbentuk ini menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat dan signifikan antar item, serta mampu merepresentasikan catatan kemiskinan selama periode lima tahun.	Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 18, No. 02, Desember 2020, pp. 136 ~ 151

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Bukan Tanah.			
15	Putri (2021). <i>Recognizing poverty pattern in Central Java using Biclustering Analysis</i>	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih,	Variabel: Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	Penerapan algoritma bicluster CC pada struktur kemiskinan di Jawa Tengah menghasilkan 2 bicluster. Bicluster pertama terdiri dari 24 kabupaten/kot e dengan 14 variabel, sedangkan bicluster kedua mencakup 10 kabupaten dengan 13 variabel.	Journal of Physics: Conference Series 1863 (2021) 012068
16	Bahauddin (2021). <i>Analisis Clustering Provinsi Di Indonesia Berdasarkan</i>	Variabel: Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan,	Variabel: Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan	Terdapat 3 cluster provinsi di Indonesia berdasarkan tingkat kemiskinannya	MISI (Jurnal Manajemen informatika & Sistem

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tingkat Kemiskinan Menggunakan Algoritma K-Means	Indeks Keparahan Kemiskinan Metode: Klasterisasi K-Means	Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	a yaitu Cluster 0 (provinsi dengan tingkat kemiskinan rendah), Cluster 1 (provinsi tingkat kemiskinan sedang), dan Cluster 2 (provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi). Provinsi yang termasuk dalam kategori provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi yaitu Maluku, Papua Barat dan Papua.	Informasi) Volume 4, No 1, Januari 2021
17	Syahrani (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Variabel: Persentase rumah tangga pengguna Listrik PLN, Air bersih, Sanitasi, Metode: PCA	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja	Variabel yang paling signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat di masing-masing Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah	Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan an Geografi, Vol 5, No 2, Desember 2021: 247-258

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	adalah banyaknya sekolah negeri. Dapat diketahui bahwa terbentuk 2 faktor dengan pemilihan eigenvalue > 1.	
			Metode: Klasterisasi K-Meas		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
18	Widodo (2021). Pengelompokan Provinsi di Indonesia Berdasarkan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Analisis <i>Hierarchical Agglomerative Clustering</i>	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah	Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki	Diperoleh 3 cluster tingkat kemiskinan yaitu cluster 1 merupakan tingkat rendah dengan anggota 25 provinsi, cluster 2 atau tingkat sedang sebanyak 7 provinsi, dan cluster 3 dengan tingkat tinggi sebanyak 2 anggota	Seminar Nasional Official Statistics , 2021(1) , 557-566.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah		
			Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
19	Yafi (2023). Pengelompokan Algoritma <i>K-Medoids</i> Dengan <i>Principal Component Analysis</i> (PCA) (Studi Kasus: Kabupaten/ Kota di Pulau Kalimantan Berdasarkan Indikator Kemiskinan Tahun 2021)	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Metode: PCA	Variabel: Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis	Diketahui bahwa data direduksi menjadi 3 Principal Component (PC) dengan menggunakan metode PCA dan didapatkan hasil pengelompokan Kabupaten/kota di Pulau Kalimantan berdasarkan indikator kemiskinan menggunakan algoritma K-Medoids yang paling optimal adalah dengan klaster sebanyak 2 dan nilai SC	Prosiding Seminar Nasional Matematika, Statistika, dan Aplikasinya 2023 Terbitan III, Agustus 2023, Samarinda, Indonesia e-ISSN: 2657-232X

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Lantai Terluas Bukan Tanah.	sebesar 0,612. Algoritma K-Medoids	
			Metode: Klasterisasi K-Means	menghasilkan 2 klaster, di mana klaster 1	
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	beranggotakan 49 Kabupaten/kot a dan klaster 2 beranggotakan 7 Kabupaten/kot a.	
20	Ramly (2022). Analisis <i>Hierarchical Multiscale Bootstrap</i> (Kasus: Indikator Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020)	Variabel: Rata-Rata Lama Sekolah;	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber	Empat klaster dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setelah dilakukan pengujian menggunakan multiscale bootstrap, ditemukan bahwa metode single linkage menghasilkan empat klaster yang valid berbeda dengan kedua metode sebelumnya yang hanya menghasilkan satu klaster dan tiga klaster. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode single linkage merupakan metode terbaik	VARIA NSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research Vol. 4 No. 3 (2022), 142-152

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	dalam melakukan klasifikasi pada kasus ini.	
21	Niswatin (2021). <i>Clustering of Districts and Cities in Indonesia Based on Poverty Indicators Using The K-Means Method</i>	Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Metode: Klasterisasi K-Means	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber	Penerapan metode Klasterisasi K-Means menghasilkan delapan klaster kabupaten dan kota dengan tingkat kemiskinan yang bervariasi. Jumlah anggota tidak klaster dari kateogir sangat tidak miskin hingga sangat miskin berturut-turut adalah 130, 76, 126, 98, 66, 5, 5, dan 8 kabupaten/kot a. Dengan distribusi ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kabupaten dan kota di Indonesia	iCMS20 21: 4-5 August 2021

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah. Metode: PCA Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023	termasuk dalam kategori sejahtera, dan hanya sebagian kecil wilayah yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus dari pemerintah.	
22	Annas (2022). <i>Implementation of K-Means Clustering on Poverty Indicators in Indonesia</i>	Variabel: Indeks Kesenjangan Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan Metode: Klasterisasi K-Means	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN;	Berdasarkan metode elbow dan indeks silhouette, diperoleh jumlah optimal sebanyak 2 klaster, di mana klaster pertama dicirikan sebagai wilayah dengan indeks kesejahteraan kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaster kedua. Hasil pengklasteran menunjukkan bahwa klaster pertama terdiri dari 42 kabupaten/kota, sementara klaster kedua mencakup 472	Matrik: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer Vol. 21, No. 2, Maret 2022, pp. 257-266 ISSN: 2476-9843

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	kabupaten/kot a.	
			Metode: PCA		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		
23	Kalla (2022). Metode <i>Subtractive Fuzzy C-Means</i> (SFCM) dalam Pengelompokan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Indikator Kemiskinan	Variabel: Persentase Penduduk Miskin; Indeks Kedalaman Kemiskinan; Indeks Keparahan Kemiskinan	Variabel: Persentase Pengeluaran per kapita untuk Makanan; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama; Rata-rata Upah/Gaji Bersih Pekerja Informal berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Jumlah; Rata-Rata Lama Sekolah; Harapan Lama Sekolah; Usia Harapan Hidup; Persentase Rumah Tangga Terhadap Akses Sumber Air Minum Bersih; Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak; Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Penerangan Listrik PLN; Persentase Rumah Tangga dengan Jenis Lantai Terluas Bukan Tanah.	Berdasarkan hasil analisis menggunakan Partition Coefficient Index (PC) membagi persentase kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan menjadi tiga klaster, yaitu klaster dengan persentase kemiskinan rendah yang terdiri atas 11 wilayah, klaster dengan persentase kemiskinan sedang mencakup 4 wilayah, dan klaster dengan persentase kemiskinan tinggi terdiri dari 9 wilayah.	VARIA NSI: Journal of Statistics and Its Application on Teaching and Research Vol. 4 No. 2 (2022), 95-108

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Metode: PCA dan Klasterisasi K-Means		
			Subjek: Jawa Tengah Tahun 2023		

2.2. Kerangka Pemikiran

Fenomena kemiskinan yang kompleks terus menjadi tantangan global, tercermin dari 1,3 miliar orang di 107 negara berkembang yang hidup dalam kemiskinan multidimensi pada tahun 2020. Di Indonesia, khususnya Provinsi Jawa Tengah, fenomena ini terlihat dari tingkat kemiskinan yang masih berada di atas rata-rata nasional meskipun berbagai program pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan. Kemiskinan di Jawa Tengah semakin kompleks dengan adanya ketimpangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan, rendahnya rata-rata lama sekolah yang mencapai 8,01 tahun, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar seperti sanitasi dan air minum bersih. Kompleksitas ini memerlukan pendekatan teoritis yang mampu menjelaskan kemiskinan secara menyeluruh, tidak hanya dari perspektif ekonomi semata.

Capability approach yang dikembangkan oleh Amartya Sen menawarkan perspektif lain dalam memahami kemiskinan. Pendekatan ini hadir sebagai kritik terhadap pengukuran kemiskinan konvensional yang hanya berbasis pada pendapatan di mana hanya mengukur jumlah orang miskin melalui populasi yang ada (Sen, 1992, p. 102).

Dalam perspektif ini, kemiskinan dipandang sebagai deprivasi atau kegagalan seseorang dalam mencapai fungsi-fungsi dasar dalam kehidupan dan Sen memahami bahwa kemiskinan itu dipandang sebagai kurangnya kemampuan atau kebebasan untuk menjalani kehidupan yang diinginkan (Salecker et al., 2020; Sen, 1992, pp. 109–110). Penelitian yang dilakukan oleh Bartolomei et al. (2024) memperkuat argument Sen dengan menunjukkan bahwa pendekatan kapabilitas memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kesejahteraan manusia, mencakup dimensi nonmoneter seperti inklusi sosial, kesehatan, pendidikan, dan kehidupan layak.

Sen juga menekankan pentingnya membedakan antara ketidakcukupan pendapatan (*inadequacy of income*) dengan rendahnya pendapatan (*lowness of income*) (Sen, 1992, p. 110). Hal ini dikonfirmasi oleh Sun et al. (2022) yang menunjukkan bagaimana kemiskinan relatif dapat memengaruhi kapabilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Dalam *capability approach*, kemiskinan tidak dipandang melalui pendapatan semata, tetapi juga dari kemampuan individu untuk mengonversi pendapatan dan sumber daya menjadi fungsi kehidupan yang diinginkan. Ayuningsasi et al. (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa *capability approach* memperkenalkan konsep *resources*, *commodities*, *capabilities*, dan *functionings* yang saling berhubungan. *Resources* adalah sarana yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan *commodities* atau barang dan jasa yang memungkinkan tercapainya *capabilities* atau kemampuan untuk melakukan dan menjadi sesuatu yang diinginkan. Proses

konversi dari *commodities* ke *capabilities* dipengaruhi oleh *conversion factors*, yaitu faktor pribadi, sosial, dan lingkungan.

Misalnya, seseorang dengan masalah kesehatan yang memerlukan biaya tinggi untuk pengobatan mungkin memiliki pendapatan lebih tinggi dari pada yang lain, tetapi tetap mengalami kekurangan ekonomi karena kesulitan dalam mengubah pendapatan menjadi kapabilitasnya. Kecukupan pendapatan untuk keluar dari kemiskinan bergantung pada karakteristik dan kondisi pribadi seseorang. Hal ini membuat Sen mengkritik pandangan tradisional tentang kemiskinan karena mengabaikan perbedaan interpersonal dalam mengonversi pendapatan menjadi kapabilitas (Sen, 1992, p. 11).

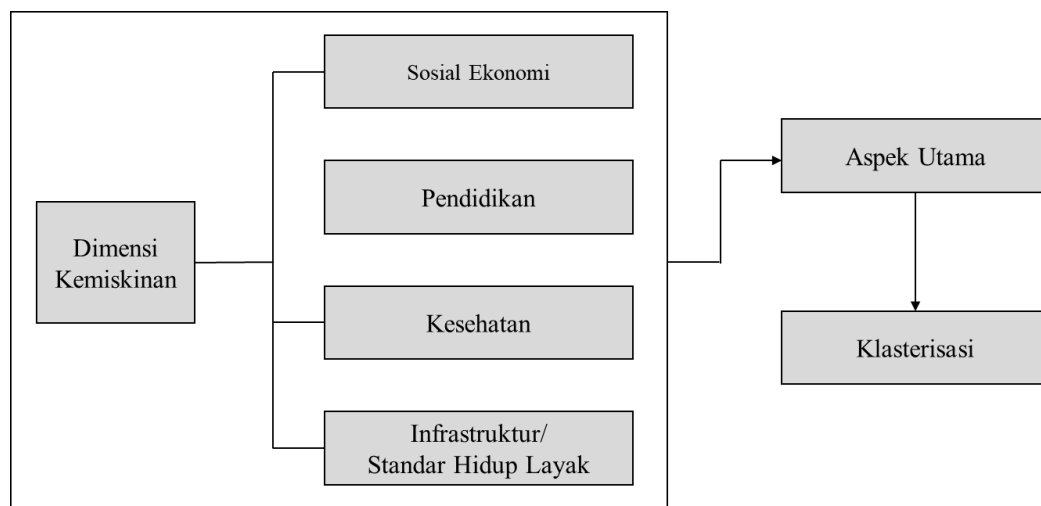
Salecker et al. (2020) mendukung kritik tersebut dengan menyatakan bahwa kemiskinan tidak hanya bisa dilihat melalui pendapatan saja, karena dua individu dengan tingkat pendapatan yang sama dapat memiliki kapabilitas yang sangat berbeda tergantung pada karakteristik personal dan lingkungan sosial mereka.

Sen (1992, p. 103) menunjukkan bahwa pengukuran kemiskinan yang hanya berfokus pada pendapatan tanpa mempertimbangkan aspek lain seringkali menghasilkan pemahaman yang tidak akurat tentang tingkat kemiskinan yang sebenarnya. Lebih lanjut Salecker et al. (2020) membuktikan bahwa pengukuran multidimensi yang mencakup berbagai aspek kapabilitas memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan dibandingkan pengukuran berbasis pendapatan semata.

Sen (1992, p. 112) mempertegas bahwa dalam menganalisis kemiskinan, yang perlu diutamakan adalah kapabilitas atau kemampuan yang dimiliki

seseorang, bukan sekedar hasil yang telah dicapai, walaupun pencapaian tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menilai kemampuan seseorang. Seperti yang diungkapkan oleh Najitama et al. (2020) dan Viarum (2024) bahwa dimensi pendidikan kesehatan, dan kualitas hidup dapat menjelaskan suatu kemiskinan. Selain itu, dalam penelitian Benjamin dan Béchervaise (2022) ditemukan bahwa sosial dan ekonomi dapat turut serta menjelaskan kemiskinan.

Berdasarkan pengukuran kemiskinan dalam multidimensi serta identifikasi masalah yang ditentukan pada BAB I, adapun kerangka dalam penelitian ini digambarkan dalam gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian